

GUNAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

RIZAL JULIANSYAH. T

01071002045

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

(2013)

R 21294
21758

352.250 7
Riz
P
C1/1 → 132490
2013

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

RIZAL JULIANSYAH. T
01071002045
Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

(2013)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Rizal Juliansyah. T
NIM : 01071002045
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal

: 26 Agustus 2013

Dosen Pembimbing

Ketua



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si.
NIP: 195401031983032001

Tanggal

: 2 September 2013

Anggota



Sukanto, S.E, M.Si
NIP: 1974032520091210010

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Rizal Juliansyah. T
NIM : 01071002045
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 26 September 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 10 Oktober 2013

Ketua,



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
NIP. 195401031983032001

Anggota,



Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 1974032520091210010

Anggota,



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP.196812241993031002

Anggota,



Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP.195804171988101002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Juliansyah. T
NIM : 01071002045
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan”**

Pembimbing:

Ketua : Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
Anggota : Sukanto, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 26 September 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 4 Oktober 2013

at Pernyataan,



Rizal Juliansyah. T
NIM. 01071002045

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Rizal Juliansyah. T
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 1989
Agama : Islam

Alamat Rumah : Komp. Sukarami Indah Blok C2 No. 16

Alamat Email : rizaljuliansyah@yahoo.com

Pendidikan Formal :

SD : SD Kartika II-3 Palembang

SMP : SMP Negeri 1 Palembang

SMU : SMU Negeri 10 Palembang

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi :- Anggota Divisi Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) periode 2008-2009
- Anggota Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) periode 2009-2010
- Kepala Bidang Eksternal BEM Fakultas Ekonomi UNSRI periode 2010-2011

Penghargaan Prestasi : -

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia –Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pendapatan dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Para Dosen Penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 16 September 2013

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Rizal Juliansyah. T

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode tahun 2007 sampai 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten-kota di provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil regresi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dilihat Nilai R^2 sebesar 0.965 menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 96,5 persen (signifikan). Hal ini berarti 96,5 persen variabel belanja daerah pada tahun 2007-2011 mampu dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sedangkan sisanya sebesar 3,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model yang dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL GOVERNMENT REVENUES AND GENERAL FUND ALLOCATION ON THE REGIONAL GOVERNMENT EXPENDITURE IN SOUTH SUMATRA

By:

Rizal Juliansyah T.; Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si; Sukanto, S.E.,M.Si.

This study was aimed at finding out to what extent the regional government revenues and general fund allocation influenced the regional government expenditure in South Sumatra.

The secondary data namely the realization of the regional government budget revenues and expenditure from the year 2007 to the year 2011. The data were analyzed quantitatively using the multiple linear regressions.

It was found that the regional government revenues and general fund allocation had positive and significant influences on the regional government expenditures in South Sumatra. The R^2 value was 0.965 which meant that the independent variable contributed 96.5 percent to the dependent variable (significant). This also meant that the regional expenditure influenced 96.5 percent of the regional revenues and general fund allocation from the year 2007 to the year 2011. The rest (3.5 percent) was influenced by other factors (*ceteris paribus*).

Keywords: *Regional Expenditure, Regional Revenues, General Fund Allocation*

Acknowledged by,



Hariswan P.J.,M.Pd.

Email: hariswan@yahoo.com

Mobile Phone: 081368572001

Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	13
2.1.1.1 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.1.2 Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah	16
2.1.2 Otonomi Daerah	16
2.1.3 Konsep Anggaran Pemerintah	18
2.1.4 Hubungan Keuangan Pusat-Daerah	20
2.1.5 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21

2.1.6 Dana Alokasi Umum	22
2.1.7 Klasifikasi Belanja Daerah	25
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2 Rancangan Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Analisis	38
3.4.1 Teknik Analisis Kualitatif	38
3.4.2 Teknik Analisis Kuantitatif	38
3.4.3 Pengujian Secara Ekonometrika	41
3.4.4 Pengujian Secara Statistik	42
3.5 Batasan Operasional Variabel	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum	46
4.1.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	46
4.1.1.1 Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan	47
4.1.2 Statistik Deskriptif	49
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah	50
4.1.2.2 Dana Alokasi Umum	51
4.1.2.3 Belanja Daerah	52
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 Pengujian Ekonometrik	53
4.2.2 Hasil Pengujian Statistik	55

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	60
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Analisis Kuantitatif Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	63
4.3.2 Analisis Kuantitatif Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	64
4.3.3 Analisis Kuantitatif Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
Daftar Pustaka	70
Lampiran-Lampiran	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (Dalam Juta Rupiah)	8
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (Dalam Juta Rupiah)	9
Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	48
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Menggunakan Correlation Matrix	54
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	58
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Variabel PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah ...	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi PAD (Dalam Juta Rupiah)	74
Lampiran 2 Laporan Realisasi DAU (Dalam Juta Rupiah)	75
Lampiran 3 Laporan Realisasi Belanja Daerah (Dalam Juta Rupiah)	76
Lampiran 4 Data Statistik Hasil Estimasi	77
Lampiran 5 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Metode Glejser	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Disatu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat



dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut: pertama, penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat, Kedua, pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom (Ulum, 2004: 51).

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009: 35)

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya

kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Warsito, 2008: 28). Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2009: 40) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung

dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002: 46). Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah (Halim, 2009: 38).

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10% (Rahmawati, 2010: 3).

Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan

yang sangat rendah dan bervariasi terjadi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertical* (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002: 40).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tidak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, dan oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal

antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006: 2).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi

Umum dijadikan instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien (Rahmawati, 2010: 5).

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu

sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Selatan terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Sumber	Tahun		
	2009	2010	2011
Pajak daerah	895.326	1.226.713	1.671.519
Retribusi daerah	14.770	17.747	11.683
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	56.809	62.606	78.957
Lain-lain PAD yang Sah	87.425	62.870	86.962
PAD (Total)	1.054.332	1.369.936	1.849.120

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam angka berbagai edisi

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2009 hingga 2011 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah masih menjadi sumber yang paling besar, sedangkan penerimaan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah pada 3 tahun terakhir menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah masih memegang peranan penting bagi sumber utama pendapatan daerah.

Dengan besarnya PAD yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan secara khusus pada tahun 2009 hingga 2011, menunjukkan adanya kenaikan penerimaan daerah. Hal ini cukup ideal dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pemenuhan (%)
2009	1.171.643	1.054.332	91.54
2010	1.496.643	1.369.936	90.0
2011	1.563.703	1.849.120	118.25

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah tahun 2009 dan 2010 belum terpenuhi, hal ini nampaknya memberikan hasil yang kontradiktif dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang saat ini. Namun pada tahun 2011 penerimaan daerah melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar Rp. 1.563.703 juta menjadi Rp. 1.849.120 juta, hal ini menunjukkan kenaikan penerimaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Sea Games.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Operasional

Penelitian dan penulisan ini dilakukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan ekonomi daerah.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu mengenai pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dianalisis secara bersama-sama maupun secara parsial, pengukuran koefisien korelasi, pengukuran koefisien determinasi

dan pengukuran koefisien regresi serta pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan-keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu, Jakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan (studi pada Kabupaten/Kota se Jawa Bali) *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Volume 08, No. 01, Februari 2007. Page 1450-1465*.
- Agustianto, Fery. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia Tahun 2006-2010. *Skripsi*, Universitas Padjadjaran, Bandung. (tidak dipublikasi)
- Astria, Sheilla A. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasi).
- Aziddin. 2012. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasi).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2012. *Sumsel dalam angka berbagai edisi*. Palembang: BPS.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba 4.
- Boediono. 1999. *Teori Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: LPFE.
- Brahmantio, Isdijoso. & Tri Wibowo. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Surakarta)". *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 6 No.1. Surakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. *SNA X, Makassar*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Dasar Hukum Otonomi Daerah*. DEPKEU. Jakarta: www.depkeu.go.id/Ind/ diakses pada tanggal 13 Februari 2013.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Data Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2011. DJPKKKRI. Jakarta: www.djpk.depkeu.go.id/ diakses pada tanggal 13 Februari 2013.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Harahap, Alfn H. 2010. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan. (tidak dipublikasi).
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Edisi kedua*. LPFE UI, Jakarta.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Khairani, Siti. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. *Kajian Ekonomi, Vol. 17 No.1, 2008: 54-75*. Palembang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Maimunah, Mutiara. (2006). "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY)". *JAAI* Volume 8 No. 2. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta. (tidak dipublikasi).
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. *Tesis* Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang. (tidak dipublikasi).
- Saputra, Septian. 2012 Analisis Kemandirian Keuangan Keuangan Daaerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2010. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasi).
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang. (tidak dipublikasi).
- Simanjuntak, Gunawan. 2009. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan (tidak dipublikasi).
- Sukriy, Abdullah dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah:Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali", *Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159*, Surabaya.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Penerbit Bumi Aksara.

....., Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.